

NOTULENSI

KEGIATAN KICK OFF MEETING PEMBAHASAN RANCANGAN RENCANA AKSI NASIONAL KETERBUKAAN PEMERINTAH INDONESIA 2018-2020

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2018

Tempat : Aula Serbaguna Lantai 1, Gedung III Sekretariat Negara

Pemimpin Rapat : Ir. Slamet Soedarsono MPP, QIA, CRMP, CGAP
Dr. Yanuar Nugroho, M.Sc., Ph.D
Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP. MPA
Agung Hikmat, M.Sc.

Agenda Rapat : Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan
Pemerintah Indonesia 2018-2020

Notulensi : Tities Eka Agustine dan Putu Lumina Mentari

Ada beberapa catatan yang dapat dirangkum dalam pertemuan tanggal 8 Agustus terkait perancangan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (OGI) terutama untuk memenuhi deadline pengumpulan pada akhir Agustus 2018

1. Presentasi Bapak Yanuar Nugroho

- Nilai-nilai dari open government ada empat Inovasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Kita ingin proses pembuatan kebijakan kita lebih berdasarkan evidence
- Ko-Kreasi merupakan proses bersama antara pemerintahan dan masyarakat sipil dalam melakukan diseminasi informasi kepada para *stakeholder*, menciptakan ruang dan platform untuk berdialog dan berkolaborasi dan menjalankan proses pembuatan proses pembuatan secara konsensus
- Rencana aksi adalah milik kita bersama, milik pemerintah bersama dengan masyarakat sipil. Keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan seluruh masyarakat sipil sangat diperlukan supaya rencana aksi yang disusun dapat memiliki dampak bagi masyarakat
- Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 mengusung empat tema utama yaitu partisipasi publik reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik dan akses informasi publik.
- Sekretariat Open Government Indonesia bersama dengan perwakilan masyarakat sipil telah mempersiapkan 13 rancangan awal Rencana Aksi nasional untuk periode 2018-2020. Rencana Aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020

rencananya akan dikumpulkan ke Sekretariat OGP pada pertengahan September 2018

2. Presentasi Bapak Velix Wanggai

- Keterbukaan pemerintah menekankan partisipasi publik yang mendalam. Sejak awal 2012 pemerintah terus memperdalam peran-peran dari kelompok masyarakat sipil.
- Upaya keterbukaan pemerintah bukan hanya pada perencanaan, namun bagaimana pendalaman dan pelaksanaan dalam presentasi publik. Diakhir, proses pengawasan juga menjadi aspek penting dalam mengawal keterbukaan pemerintah.
- Rencana aksi yang akan dibentuk itu bukan hanya pada level nasional, tapi juga akan dibawa pada level global. Eksekusinya akan melibatkan 17 kementerian dan lembaga beserta 4 kabupaten dan kota. Oleh karena itu harus ditekankan untuk terus memperkuat partisipasi publik, dan penyusunan rencana aksi, menajamkan fokus untuk rencana aksi baik dipusat maupun di daerah.

3. Presentasi Saudara Agung Hikmat

- Dalam kesempatan akan dijelaskan mengenai apa grand challengesnya dalam komitmen OGP dan adakah instrument yang bisa digunakan
- Pembuatan rencana aksi nasional ini berdasarkan dari RKP, program pantauan Presiden, bagaimana open government bisa mendukung SDG.
- OGI akan berperan didalam lima aspek; 1. akses partisipasi publik, 2. reformasi publik, 3. Akses informasi publik, 4. tata kelola data, 5. Inovasi pelayanan publik.
- Penjelasan mengenai rencana aksi yang ada yang berlandaskan 13 rencana aksi dan 2 rencana aksi tambahan Inisiatif daerah akan masuk kedalam kerangka rencana aksi keterbukaan daerah

4. Sesi Pendapat dan Tanya Jawab

- Pak Suprijanto dari Bojonegoro Pak Supriyanto menyatakan bahwa perlu sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan yang ada di kota dan kabupaten dan perlu adanya pendekatan yang lebih mendalam dari pusat ke daerah dalam upaya keterbukaan pemerintah. Dalam negara demokrasi, keterbukaan menjadi hal yang wajib, dan dalam hal ini dalam bentuk transparansi.
- Yuyun dari B-Trust menyatakan bahwa B-Trust telah diberikan mandat dari USAID-Cegah untuk mengembangkan Laporan dan analisa laporannya yang melibatkan 6 kementerian dan 13 provinsi di seluruh Indonesia. Akan sangat menarik pengalaman kami bisa berkontribusi rencana aksi OGI terutama dalam pengembangan Laporan. Gaung Laporan untuk saat ini belum sampai ke daerah-daerah dan kementerian

masih resisten terhadap integrasi data. Kementerian pun agak resisten menggunakan Laporan seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Rencananya akhir bulan ini kami akan melaporkan progress proyek ini kepada Ombudsman, Kemenpan RB dan KSP, mudah-mudahan hasil ini akan berkontribusi untuk rencana aksi ini.

- Ana dari sekretariat SDGs menanyakan, *pertama* kepada pak Deputi Polhumkanham : Salah satu aksi dalam renaksi yang berhubungan dengan SDGs adalah penyusunan panduan partisipasi publik dalam penyusunan rencana aksi nasional. Untuk rencana aksi OGI berikutnya tahun 2018-2020 memberikan masukan terkait poin-poin yang berkaitan dengan SDGs. Apa *insight* dari bapak untuk follow up, khususnya untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Dari sekretariat SDG mengamati, sepertinya ini belum optimal. Pertanyaan *kedua* kepada pak Agung; bagaimana pesan-pesan OGP Summit, khususnya untuk mendukung SDGs yang berkaitan dengan pelaksanaan goal 16, khususnya target 10 yang kaitannya tentang keterbukaan informasi dan akses publik terhadap informasi. Ada satu indikator yang global yang bagi Indonesia masih sulit untuk diukur sekalipun karena datanya tersebar dimana-mana dan kalau kita melihat dari renaksi-renaksi OGI selama ini, bagaimana rencana aksi berikutnya dapat mendukung dalam mengukur indikator tersebut. Indikator tersebut adalah bagaimana kita memverifikasi jumlah kasus atas pembunuhan, penculikan, penghilangan secara paksa, perlakuan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja dan pembela HAM? Kira-kira apa yang bisa kita cantumkan dalam renaksi OGI berkaitan dengan ini. Pertanyaan yang ketiga peran PPID dalam pencapaian SDGs sampai sejauh mana dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan?
 - Jawaban dari Pak Yanuar mengenai SDGs: Yang pertama, kita punya berbagai sekretariat yang mendalami inisiatif global, kita punya sekretariat untuk menangani kasus stunting, kita punya sekretariat nasional strategi pencegahan korupsi (yang mengajak kerjasama pemerintah dan KPK), kita punya sekretariat SDGs, kita punya sekretariat EITI, kita punya sekretariat penanganan perubahan iklim. Karena banyaknya sekretariat ini, berimplikasi pada isu-isu mengalami irisan pada sekretariat dan K/L yang berkaitan. Misalnya untuk isu Beneficial Ownership, laporannya harus kemana, apakah ke KPK, Sekretariat OGI atau Sekretariat EITI. Untuk itu kita harus jadikan Bappenas platform strategis, dimana semua sekretariat itu berkomunikasi di Bappenas. Ini langkah pertama agar kita jangan menyusahkan diri kita sendiri dengan memproduksi berbagai laporan. Sehingga laporan yang kita kirimkan hanya satu, dan laporan ini bisa diekstrak untuk keperluan seknas-seknas dan K/L yang memerlukan, termasuk sekretariat SDGs, untuk mekanismenya nanti kami membutuhkan masukan dari teman-teman kedepannya. Ketika kita berbicara mengenai partisipasi publik, perencanaan

satu hal, tapi monev dan collective actionnya seperti apa. Saya lihat pelaksanaannya itu di Bappenas sudah cukup baik. Dan teman-teman di OGI bisa membrikan proses konsultasi yang meaningful, agar kelompok masyarakat sipil tidak tertinggal dan proses ko-kreasi ini berjalan. OGI sebaiknya dijadikan metodenya saja. Yang kedua mengenai goal 16 target 10 adalah lebih rumit lagi, karena ini bukan hanya berkaitan dengan teknis tapi juga politis. ALPF memungkinkan kita untuk memilih indikator yang kita akan submit. Kita harus berpikir secara realistis, yang kita pikir itu sulit tapi penting, itu kita harus mulai untuk membuka ruang diskusinya. Kita punya ruang untuk mendiskusikan itu di OGI. Terakhir mengenai PPID akan dibahas pada pertemuan mendatang.

- Candra Wijaya dari Wahana Visi Indonesia (WVI): • progress OGI yang melibatkan CSO dan masyarakat sipil sangat baik sekali. Kebetulan WVI ikut mencontohkan mekanisme akuntabilitas sosial dalam OGP dalam pelayanan publik, kami senang sekali salah satu upaya kami masuk dalam renaksi. Program yang kami lakukan adalah pendekatan suara dan aksi warga di NTT. Kami berharap melibatkan masyarakat dalam mekanisme kebijakan khususnya di bidang kesehatan antara masyarakat dan penyedia layanan kesehatan sehingga terjadi pemetaan yang konstruktif dan ini menjadi praktik baik dan bisa menjadi ikut bagian dalam renaksi. Salah satu hal yang kami sadari adalah musrenbang sudah baik. Tetapi kesiapan masyarakat belum optimal biasanya hanya datang dan hadir. Dalam pendekatan suara dan aksi mereka menyadari apa masalah yang terjadi dan mereka bersama menyediakan prioritas Renaksi. Sehingga yang kami temukan bahwa masyarakat bisa diberdayakan dan bisa terjadi sinergisme layanan dan partisipasi masyarakat. Harapannya akuntabilitas dalam pelayanan publik bisa digaungkan.
- Mujtaba Hadi dari Medialink: pertama, keterlibatan CSO dalam Open Government Indonesia. Renaksi yang tercantum dalam power poin mas Agung tidak menutup masukan dari CSO-CSO lain yang ingin terlibat dalam berbagai proses yang akan datang. Kami mengundang agar CSO yang lain terlibat dalam proses Open Government . Kedua, kami menerima aspirasi dari teman-teman lembaga bantuan hukum, untuk bisa memasukkan poin tentang akses bantuan hukum. Sangat penting untuk memperluas akses informasi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Saya pikir kawan-kawan di pemerintahan sudah memiliki kesiapan untuk hal ini.
- Yenti dari Seknas Fitra: harapannya akan ada banyak input juga dari kementerian. Focal point yang disana hanya focal point saja. Saya mengkhususkan kementerian dan lembaga untuk draft renaksi yang sebagian besar dirumuskan oleh CSO. Dan usulan itu kita coba rumuskan berdasarkan kondisi di lapangan yang kita baca dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh CSO di lapangan. Tentu saja kami berhadapan ada feedback dari kementerian dan lembaga. FITRA menjadi focal point keterbukaan

informasi publik, untuk keterbukaan informasi publik melihat ada perkembangan yang signifikan melalui OGI bahwa angka keterbukaan K/L mengalami kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan indeks partisipasi publik. Pada level daerah fitra juga punya kajian tentang LBI, daerah mengalami kecenderungan penurunan keterbukaan informasi publik. PPID bertambah tetapi kualitas keterbukaan menurun. Hal ini perlu diturunkan dari keterbukaan level anggaran supaya kementerian dalam negeri sudah harus masuk. Sementara di kemenkeu ada DJPK sehingga yang kita butuhkan integrasi dan sinergi kementerian dan lembaga. Persoalannya bagaimana cara mengintegrasikan hal tersebut karena adanya ego sektoral.

- Aditya dari KIP: Ini menjadi kewajiban KIP untuk keterbukaan anggaran, kepemilikan manfaat itu menjadi concern kami. Dan kami memberitahukan bahwa KIP baru saja memberlakukan peraturan KI terkait dengan pemerintahan desa, standar layanan pemdes. Titik berat kami disini, kami ingin dilibatkan dalam beberapa renaksi. Menjawab beberapa poin terkait PPID menjadi concern KIP pada renaksi 2016 ada satu dan ketika ditanyakan CSO apa manfaat PPID bahwa sebagai pejabat pengelola menjadi pintu utama sebagai penyedia informasi publik. Kita tidak memiliki data sebagaimana manfaat informasi yang dibuka oleh PPID. Harusnya menjadi PR bersama.
- Iwan dari Kemenkumham; Pertama, rencana aksi pertama terkait dengan perpres Beneficial Ownership. Berberapa langkah sudah kami lakukan terutama dalam membuat turunan dari perpres tersebut. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara intensif untuk menyusun program tersebut, karena ini banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerahasiaan. Kedua, terkait dengan bantuan hukum untuk rakyat miskin. Kami melalui program BPHN punya program bantuan hukum untuk rakyat miskin. Ini merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan 3-4 tahun yang lalu. Alokasi anggarannya dikelola oleh kantor wilayah. Itu ada kegiatan yang namanya bantuan hukum rakyat miskin. Ada litigasi dan non litigasi. Agar partisipasi masyarakat dapat menjadi contoh. Selain itu dilakukan juga melalui organisasi bantuan hukum. Dalam aspek transparansi kami juga sudah melibatkan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
- Kemendagri: untuk pelaksanaan OGI, khususnya terkait dengan keterbukaan, perencanaan keuangan partisipatif, kedepannya bisa didiskusikan dalam pertemuan Bilateral.
- Pak Kusnandaka dari Diskominfo Bojonegoro: Pertama, perlu ada keterkaitan program renaksi nasional yang sudah mengalir ke daerah. Antara lain SPBE, SMART CITY, SINOVIK dan sebagainya. Tools yang digunakan sudah ada sehingga perlu dimanfaatkan sehingga dapat diukur dengan jelas kemanfaatan renaksi yang dilakukan. Kedua karena ini berbicara tidak hanya nasional dan daerah, pengalaman

kami kemarin ada yang nyambung ada yang tidak. Harapan kami adalah ada satu dua rencana aksi yang sifatnya harus menjadi rencana aksi inline dari nasional sampai dengan daerah yang dapat digunakan sebagai platform pengembangan di daerah. Tools-tools yang ada di daerah sudah ada contohnya di Surabaya dalam bidang kesehatan, dimana masyarakat bisa mengetahui fasilitas dan ruangan rumah sakit yang tersedia, karena informasi ini dibuka. Tools-tools ini seperti bisa kita manfaatkan untuk rencana aksi. Sama untuk kemiskinan, misalnya di Banyuwangi, kita bisa mengetahui angka kemiskinan melalui data-data geospasial. Bojonegoro pada tahapan pada aplikasi bos terhadap NTFC. Belum dan sinkronisasi regulasi PPID eselon 3, sisi yang lain urusan diskominfo termasuk pemanfaatan lapor. Portal data Indonesia ini sudah menerapkan itu mengambil dari UKP4. Portal data Indonesia tidak bisa di sharing maka dalam 1 sheet tidak dapat di share tahun-tahun berikutnya. Belum ada cantolan ke daerah, di nasional ada seknas OGI lalu bagaimana di daerah. Membutuhkan cantolan tata kelola OGI untuk implementasi di daerah.

Tahapan Selanjutnya

- Masing-masing dari Kementerian/Lembaga dan CSO akan dikelompokkan berdasarkan topik pada rancangan Rencana Aksi Open Government Periode 2018-2020. Kelompok-kelompok tersebut akan melakukan pertemuan bilateral yang telah ditetapkan oleh tim OGI.
- Pertemuan bilateral bertujuan untuk memperdalam rencana aksi Open Government Indonesia periode 2018-2020 akan dikumpulkan ke sekretariat OGP pada awal September 2018.